

Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

¹Nabila Nur Fitriani, ²Siti Marwiyah, ³Eko Yudianto
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Panca Marga
Korespondensi : nabilazifara30@gmail.com

Abstrak

Pendapatan nelayan merupakan sumber utama para nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup, namun pada kenyataannya masih cukup banyak nelayan khususnya di daerah kecamatan mayangan Kota Probolinggo belum dapat meningkatkan hasil dari pendapatan. Besarnya pendapatan akan mampu mendorong para nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka maka kebutuhan-kebutuhan lain seperti peningkatan pengelola permukiman serta sarana dan prasarannya akan ikut mengalami peningkatan. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui pengaruh dari adanya peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan. Peneliti secara langsung untuk melakukan teknik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini diurai dalam teori pengaruh sosial Raditya yang menjelaskan acceptance(penerimaan) dan compliance(kepatuhan).

Kata kunci: Pengaruh, peraturan pemerintah, pendapatan nelayan

Abstract

Fishermen's income is the main source of fishermen to meet their daily needs, but in fact there are still quite a lot of fishermen, especially in the Mayangan sub-district, Probolinggo City, have not been able to increase their income. The amount of income will be able to encourage fishermen to meet their basic needs, so other needs such as improving the management of settlements and their facilities and infrastructure will also increase. The purpose of this analysis is to determine the effect of government regulation no. 85 of 2021 on fishermen's income. Researchers directly conduct in-depth interviews and field observations. The results of this study are described in Raditya's social influence theory which explains acceptance and compliance. obedience).

Keyword: Influence, government regulations, fishermen's income

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang mempunyai sekitar 17.000 pulau kecil dan besar. Dengan panjang total sekitar 87.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, wilayah lautan Indonesia lebih luas dua kali luas daratannya. Dengan wilayah pesisir yang begitu besar, Indonesia seharusnya sudah menjadi negara yang sangat kaya dan makmur karena banyaknya potensi yang ada di kelautan. 1 Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik Sumberdaya yang dapat pulih, seperti ekosistem hutan mangrove, ekosistem terumbu karang dan perikanan maupun Sumberdaya yang tidak dapat pulih, seperti minyak dan gas bumi serta mineral atau bahan tambang lainnya, dan jasa lingkungan, seperti pariwisata bahari, jasa angkutan dan sebagainya.

Dengan melihat kondisi dan kekayaan sumber daya laut yang ada di daerah pesisir Indonesia, para nelayan daerah pesisir seharusnya dapat hidup sejahtera dan berkecukupan. Namun sayangnya, hal ini belum bisa terwujud. Masih banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan para nelayan masih jauh dari taraf kesejahteraan, Akan tetapi dalam kenyataannya potensi laut yang ada belum dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nelayan sebagai salah satu roda

penggerak perekonomian sektor kelautan. Namun, dengan keterbatasan dalam teknologi penangkapan, sumber daya manusia dan modal menyebabkan mereka berada pada garis kemiskinan. Kota Probolinggo merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian nelayan. (asmita 2017)

Nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam laut baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya (Rosni, 2017). Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lain dan nelayan indetik dengan kemiskinan, banyaknya jumlah anak dalam keluarga dan pendidikan yang rendah (Kusnadi, 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) pasal 7 ayat (3), pasal 8 ayat(3), pasal 10 ayat (2) dan pasal 12 ayat (2) Undang undang nomer 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak,perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kelautan dan perikanan .(*Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021*).Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengklaim PP No 85 Tahun 2021 tersebut memberatkan dan merugikan masyarakat kecil hingga nelayan. atas pencabutan PP Nomor 85 Tahun 2021 didasari komitmen pemerintah seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, dan Petambak Garam. Dia menyatakan PP nomor 85 Tahun 2021 serta Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021 dan Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2021 bertentangan dengan UU tersebut lantaran tidak berpihak pada masyarakat nelayan. Bahwa implementasi dari PP No 85 Tahun 2021, Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021, dan Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2021, dalam tatanan pelaksanaannya akan meningkatkan harga pokok ikan dan ini akan berakibat akan meningkatkan harga jual ikan kepada masyarakat Indonesia.penerapan PP Nomor 85 Tahun 2021 hingga Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021 bisa berdampak pada ambruknya perikanan Indonesia lantaran nelayan enggan melaut. Ini, kata dia, juga akan berdampak pada meningkatnya pengangguran di Indonesia. (<https://news.detik.com/>)Peraturan pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian dan Perikanan. Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)yang berlaku pada kementerian kelautan dan Perikanan(KKP) aturan yang memberatkan adalah mengenai besarnya tarif kenaikan PNBP kepada nelayan sekitar 5-10% adanya PP tersebut dianggap merupakan kebijakan yang tidak melibatkan publik,dalam hal ini nelayan dan pelaku usaha perikanan. (<https://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2011-12.pdf>). Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 diundangkan pada 19 Agustus 2021 dan mulai berlaku 30 hari setelahnya. Aturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan wujud penyederhanaan dari kebijakan sebelumnya yaitu PP 75/2015. Dimana semula 4.936 ada tarif menjadi 1.671 tarif.Pada PP 85/2021 jenis dan tarif atas jenis PNBP dikategorikan menjadi 18 jenis PNBP yang terdiri atas satu pemanfaatan SDA perikanan dan 17 jenis PNBP pelayanan yang dikelola oleh 7 unit Eselon I, yakni DJPT, DJPB, DJPRL, DJPDSPKP, DJPSDKP, BRSDM dan BKIPM.Sesuai amanah PP 85/2021, ada perubahan formula pemungutan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dari semula hanya penarikan praproduksi bertambah dengan penarikan pascaproduksi dan penarikan dengan sistem kontrak. Kemudian ada perubahan penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) dari semula ditetapkan Kementerian

Perdagangan menjadi ditetapkan oleh KKP. aturan penarikan PNBPN dalam PP 85/2021 tersebut, adanya pengenaan tarif sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan persyaratan dan pertimbangan tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tarif Rp0 ditujukan pada pelaku utama perikanan berskala kecil, seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam hingga pengolah hasil perikanan berskala kecil..PP ini sangat baik karena yang sebelumnya tidak ada ketidakpastian nilai pungutan. Sebenarnya pasti hanya nilai pungutan bisa di bawah estimasi atau justru di atas estimasi. Sebagai contoh, nelayan membayar PNBPN padahal tidak mendapat hasil tangkapan yang sesuai.

2. METODE

Metode penelitian merupakan langkah-langkah operasional dalam penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan sehingga diperoleh yang benar, objektif, dan ilmiah. Dengan adanya metode penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran ilmiah.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistic, kompleks dan rinci Saputra, T dkk (2022).Penelitian kali ini menggunakan kualitatif untuk menguraikan data-data yang berupa penjelasan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian yang dimaksudkan untuk membatasi objek kajian agar penelitian tidak terjebak pada banyaknya data di lapangan, dan untuk menghindari data yang tidak relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian adalah sebagai pengaruh peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di kecamatan mayangan kota probolinggo dan untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam Peraturan Pemerintah No 85 tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Mayangan kota Probolinggo. Bagaimana pengaruh peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di kelurahan Mayangan kecamatan ayangan kota Probolinggo,teori yang digunakan yaitu teori pengaruh sosial

3.Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya aktivitas penelitian, termasuk mencari data-data objektif yang digunakan untuk menjawab suatu masalah yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian di sini adalah di Dinas Perikanan dan Kelautan kecamatan mayangan Kota Probolinggo.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah: Masyarakat nelayan di Mayangan.

Sumber Data

Sumber data merupakan asal darimana data tersebut diperoleh atau didapatkan. keberadaan data adalah untuk dapat menyajikan sumber informasi sebagai pokok kajian atau alat analisis yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Arikunto (2013:172),

Adapun selama melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan informasi atau data-data dari tempat penelitian. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, hasil dari wawancara, dan diskusi. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada :
 - a. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Probolinggo
 - b. Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Probolinggo
 - c. Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Probolinggo
 - d. Kepala Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
 - e. Kepala kelurahan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo
 - f. Masyarakat nelayan di Kecamatan Mayangan
2. Sumber data sekunder, yaitu informasi yang bersumber dari buku-buku teks, hasil penelitian, dan arsip-arsip resmi yang terkait masalah penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ini berupa dokumen-dokumen yang menyangkut penelitian terkait, yaitu peraturan, kebijakan internal organisasi, dan sejenisnya. Data sekunder, seluruh Masyarakat nelayan di Mayangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik interaktif termasuk di dalamnya meliputi:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Instrumen Penelitian

Instrument penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, ataupun daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan sebuah informasi dari informan. peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian, ada pula untuk melengkapi data-data dan membandingkan dengan data yang telah didapatkan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi (Arikunto, 2002:132). Instrument penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian Sendiri
2. Pedoman Wawancara.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Berdasarkan Variabel Pendapatan Tingkat pendapatan yang diperoleh nelayan sekali melaut sangat bervariasi. Perbedaan pendapatan diantara nelayan sangat dipengaruhi oleh produktifitas nelayan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan nelayan dalam satu kali melaut. Pada kelompok pendapatan nelayan sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp 150.000 terdapat 5 nelayan atau 16,6 % dari 30 responden. Pada kelompok pendapatan sebesar Rp. 151.000 sampai Rp 200.000

terdapat 18 orang nelayan atau 60 % dari jumlah responden. Pada kelompok pendapatan > Rp 201.000 terdapat 11 nelayan atau 36,7%.

Pendapatan nelayan pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh dari adanya peraturan baru pemerintah yaitu Pp No 85 Tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, gambaran umum tingkat pendapatan nelayan menunjukkan persentase sebesar 16,67% untuk kategori rendah, tingkat pendapatan nelayan persentase sebesar 66,66% dan untuk kategori sedang tingkat pendapatan nelayan persentase sebesar 16,67% untuk kategori tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa secara umum, tingkat pendapatan nelayan tergolong pada kategori sedang karena persentase pendapatan nelayan tertinggi berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 66,66%.

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam usaha nelayan, sudah sering didengar mengenai pendapatan, dimana pendapatan ini yang biasanya digunakan untuk melihat tolak ukur nelayan tersebut tergolong berpendapatan sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah yang dilihat dari jumlah perolehan nelayan perbulan. Oleh karena itu, pendapatan merupakan bagian yang sangat penting dalam melihat perubahan kemampuan nelayan untuk menghasilkan hasil tangkapannya. pendapatan nelayan dikatakan sangat tinggi, sedang maupun rendah juga dipengaruhi beberapa faktor yang dapat mendorong dan menghambat nelayan tersebut untuk memperoleh hasil tangkapan yang diinginkan sehingga pendapatan yang mereka peroleh sesuai.

Adapun faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tersebut terdiri dari tiga, yaitu faktor teknologi, faktor sosial & ekonomi dan faktor tata niaga. Teknologi, peralatan yang digunakan nelayan dalam penangkapan ikan, berupa perahu tanpa mesin atau perahu dengan mesin yang kecil (motorisasi), jaring, pancing, pukat dan togok. Sosial dan ekonomi, yang terdiri dari: umur, pendidikan, pengalaman, peralatan, anggota organisasi atau tidak anggota, serta musim. Sedangkan dari faktor tata niaga yaitu, panjang atau pendek saluran distribusi yang dilalui oleh hasil produksi, banyak atau sedikit dari jumlah pos-pos yang terdapat pada saluran distribusi tersebut, menambah keuntungan bagi nelayan atau tidak setiap pos saluran distribusi tersebut. Karena kondisi atau keadaan ikan ini sangat berpengaruh pada harga ikan, demikian juga nilai gizinya. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi pendapatan nelayan, yaitu banyak sedikitnya modal yang dipergunakan. Banyak sedikit modal yang dipergunakan nelayan sangat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan observasi terhadap nelayan di kelurahan mayangan, penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Pendapatan nelayan sendiri dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang telah dijelaskan di atas. Pengimplementasian peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan sendiri masih belum terlaksana dengan baik karena adanya penentangan oleh para nelayan terutama pemilik kapal, karena dengan adanya peraturan tersebut dapan merugikan pemilik kapal dan juga nelayan atas tarif yang tinggi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kepada nelayan di daerah kecamatan mayangan dapat diambil kesimpulan :

- a) Peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di daerah kecamatan mayangan.

- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan yaitu faktor teknologi, faktor social, ekonomi dan faktor tata niaga.
- c) Yang mengakibatkan Peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan yang berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di daerah kecamatan mayangan, adalah belum terimplementasikan dengan baik peraturan oleh pemerintah tersebut terhadap para nelayan mauoun pemilik kapal itu sendiri

5. SARAN

- a) Untuk meningkatkan pendapatan nelayan perlu diberikan penyuluhan oleh dinas/instansi terkait tentang kelayakan dalam menangkap ikan. Terutama dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan jumlah produksi ikan nelayan.
- b) Diperlukan suatu penyuluhan tentang peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 tentang penerimaan negara bukan pajak dari dinas perikanan atau kementrian perikanan kepada pemilik kapal serta nelayan itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariani, V. H. (2008). Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Tahun 1990-2006.
- [2] Firdaus, M., & Witomo, C. M. (2014). Analisis tingkat kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan rumah tangga nelayan pelagis besar di Sendang Biru, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(2), 155-168..
- [3] Ilyasa, F., Zid, M., & Miarsyah, M. (2020). Pengaruh eksploitasi sumber daya alam perairan terhadap kemiskinan pada masyarakat nelayan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 21(01), 43-58.
- [4] Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*, 16(3), 149-159.
- [5] Saputra, T., & Eka, E. (2022). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis Service Excellence pada car wash Kota Pekanbaru. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5(2), 157-166
- [6] Saputra, T., Yandra, A., Zahra, M., Eka, E., & Sufi, W. (2022). Implementation of Slum Settlement Management Policies in the District of Lima Puluh Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 5(2), 197-207.
- [7] Triandi, R. J. (2018). *Kajian Pemasaran Ikan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Dan Pengembangan Wilayah Di Kota Probolinggo* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

- [8] Wijaya, R. A., Triyanti, R., Zamroni, A., Wahab, I., & Alwi, D. (2021). Ketimpangan Pendapatan dan Pengeluaran Nelayan di Kabupaten Pulau Morotai. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 125-136..
- [9] Wirasandi, W., Junaidi, A. M., Zainuddin, M., Hamidy, R. R., & Murcahyanto, H. (2021). Studi Analisis Awig-Awig Nelayan Lungkak. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*, 4(2), 78-90..